



home / Opini

Korupsi, Tragedi Beruntun dan Tragis saat Pandemi

Oleh SUPARTO WIJOYO *)

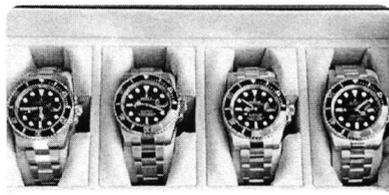
OPINI 8 Desember 2020, 20:06:53 WIB



BERITA MENARIK LAINNYA

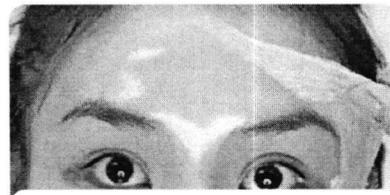


BLACKPINK BAKAL HADIR DI PARIS FASHION WEEK, JENNIE BERANGKAT MENYUSUL



JAM TANGAN REPLIKA ROLEX DISKON HINGGA 90%. HANYA 3 HARI PEMBUKAAN

Rolex Replica



VIRAL! WANITA 58 TAHUN DENGAN BABY FACE LAKUKAN INI SETIAP MALAM

Neolift



LUHUT JANJI BAWA DAN BUMBU INDONESIA EKSPOR PASAR INTERNASIONAL

SUNGGUH tragedi nan tragis yang menimpa negeri ini di kala pandemi Covid-19. Belum reda berita KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan budi daya lobster (25/11), muncul aksi penangkapan Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna (27/11) yang bersambung OTT Bupati Banggai Laut, Sulawesi

menjerembapkan bangsa. Dan sejatinya, banyak tokoh politik yang diprediksi sedang antre menunggu giliran apabila tidak hati-hati.

Pesta Madu Beracun

Mengapa pemegang kekuasaan acap kali melakukan pesta besar "madu beracun" yang bernama korupsi? Jalan ceritanya nyaris serupa dengan kisah hidup yang dituangkan David Albahari, cerpenis asal Serbia, dalam karyanya, *Trash is Better, Cinta Semanis Racun* (2016). Inilah kasmaran harta dan daulat yang mematikan. Korupsi adalah realitas yang memperhinakan pejabat negara dari sosok berkedudukan "terhormat", status sosial bergengsi, dan rata-rata mengenyam pendidikan tinggi tersungkur di balik jeruji besi.

Rasa geram sebagai warga negara atas korupsi yang bersarang dalam situasi resesi akibat pandemi Covid-19 adalah niscaya. Korupsi pada setiap segmennya benar-benar menggerogoti sumber daya negara. Laku korupsi oleh jajaran politikus dan birokrat menjadikan mereka berjarak dengan makna fundamental negara hukum.

Dalam lingkup demikian, benarlah apa yang diungkapkan Arnold J. Heidenheimer dan Michael Johnston dalam bukunya, *Political Corruption* (2009). Mereka menganalisis kedudukan finansial partai politik, sistem kampanye dan kompetisi politik, serta relasi di birokrasi cenderung tergiring memasuki lahan kekuasaan politik yang bernama korupsi. Terdapat "seloroh" seperti disindir oleh sastrawan besar Pramoedya Ananta Toer sejak 1957 melalui novel *Korupsi* bahwa korupsi telah bergerak dari urusan moral individual menjadi masalah sosial politik, fenomena yang membudaya.

Kondisi itu pastilah menorehkan keperihan sebuah bangsa yang meneguhkan diri bertata kelola pemerintahan dalam negara hukum. Tampilan politik hukum dalam prahara korupsi yang melibatkan kaum "cerdas" di pucuk birokrasi, wakil rakyat, penegak hukum, ASN, dan aktor korporasi secara umum dapat mengaburkan tugas pengabdianya. Tindakan koruptif mereka mencerminkan pekerjaan yang rapi, sistematis, dan kolosal serta menampilkan "peradaban rasuah" yang tingkat kedaruratannya sangat mengkhawatirkan.

Semestinya pengamalan nilai-nilai dasar negara dapat menjadi referensi dan spirit untuk memperkuat KPK membersihkan bangsa ini dari penyakit

- **Baca Juga:**
Pilkada, Pembuktian Kematangan Budaya Politik

Dinyatakan pula bahwa etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, dan rendah hati. Bahkan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ingat Marcus Tullius Cicero

Saya sendiri terus-menerus merenungi situasi ganjil atas lakon korupsi yang berulang tiada henti, apalagi saat pandemi Covid-19. Pada titik ini saya teringat sosok yang ditulis Robert Harris (2006) sebagai negarawan dan orator brilian bernama Marcus Tullius Cicero. Kisah di tahun 70 SM dimulai ketika Tiro membuka pintu suatu pagi yang dingin dan menemukan seorang pria tua yang ketakutan. Dia adalah penduduk Sisilia yang menjadi korban kepala daerah Romawi yang korup, Verres.

Orang itu meminta Cicero mewakilinya menuntut penguasa korup itu. Namun, bagaimana senator Cicero yang tidak kaya, tak dikenal, bahkan dibenci kaum aristokrat dapat memulai tuntutan terhadap penguasa yang memiliki pendukung di takhta tertinggi. Dengan kecerdasan dan kekuatan suaranya, Cicero mempertaruhkan seluruh hidupnya demi ambisinya meraih jabatan tertinggi di Romawi: imperium yang sesungguhnya. Capaian Cicero dan para penguasa yang kena OTT pada hakikatnya menyediakan pemaknaan introspeksi diri agar tidak tergoda rayuan takhta dan harta secara nista.

Dari apa yang terhelat di OTT KPK dapat menjadi momentum penting untuk eling lan waspodo dengan menggali kembali dasar-dasar kepemimpinan bangsa. Terhadap hal ini, bacalah catatan Transparency International sebagaimana disitir oleh Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi (2016) dalam buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia dari Daendels (1808–1811) sampai Era Reformasi. Dipaparkan bahwa korupsi itu menyangkut penyelewengan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (corruption involves the abuse of public office for private gain).

- **Baca Juga:**

Bunyinya, "Pada mayat yang terbungkus, tergantung tablet dengan tulisan: Akulah Syaddad yang Agung. Aku menaklukkan seribu kota; seribu gajah putih dikumpulkan untukku; aku hidup selama seribu tahun dan kerajaanku menjangkau timur dan barat. Tetapi, ketika kematian datang kepadaku, tak satu pun dari semua yang aku kumpulkan berfaedah bagiku. Engkau yang menyaksikanku dapat mengambil pelajaran: waktu tak bisa dipercaya."

Lantas buat apa korupsi, daulatmu akan sirna. (*)

**) Suparto Wijoyo, Wakil direktur Bidang Riset, Pengmas, Digitalisasi, dan Internasionalisasi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga*

Saksikan video menarik berikut ini:

Ibadah Natal di Tengah Pandemi



Editor : Dhimas Ginanjar



kpk suparto wijoyo edhy prabowo

Saksikan video menarik berikut ini:

Polisi Pertemukan Gigi Palsu yang Sempat Hilang dengan...